

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024

BPBD @ 2025 by bpbd



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang telah selesai disusun. LKjIP merupakan bentuk komitmen BPBD Kabupaten Jombang dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana dimuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

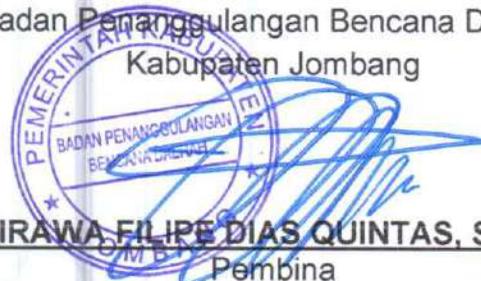
Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan kinerja instansi pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan yang dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan bersama oleh seluruh jajaran BPBD Kabupaten Jombang sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi dan pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja BPBD Kabupaten Jombang diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan dan bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui LKjIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip pelayanan masyarakat dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah serta sebagai bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penentuan kebijakan, program/kegiatan dan perwujudan Kinerja BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2024.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu BPBD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat, dukungan unsur *Multi Helix* Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jombang baik unsur pemerintah, lembaga relawan, akademisi, pers dan dunia usaha merupakan suntikan semangat untuk terus berbenah diri. Selanjutnya, kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa dinantikan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam pelayanan masyarakat di tahun mendatang untuk mewujudkan Jombang yang Tanggap, Tangkas, Tangguh Bencana.

Akhir kata, laporan ini disusun dengan harapan menjadi manfaat bagi banyak pihak dan catatan perbaikan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang kedepan. Bencana urusan bersama, tetaplah tangguh demi kemanusiaan. Intine, tetep semangat tanpo sambat.

Jombang, 6 Januari 2025

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jombang



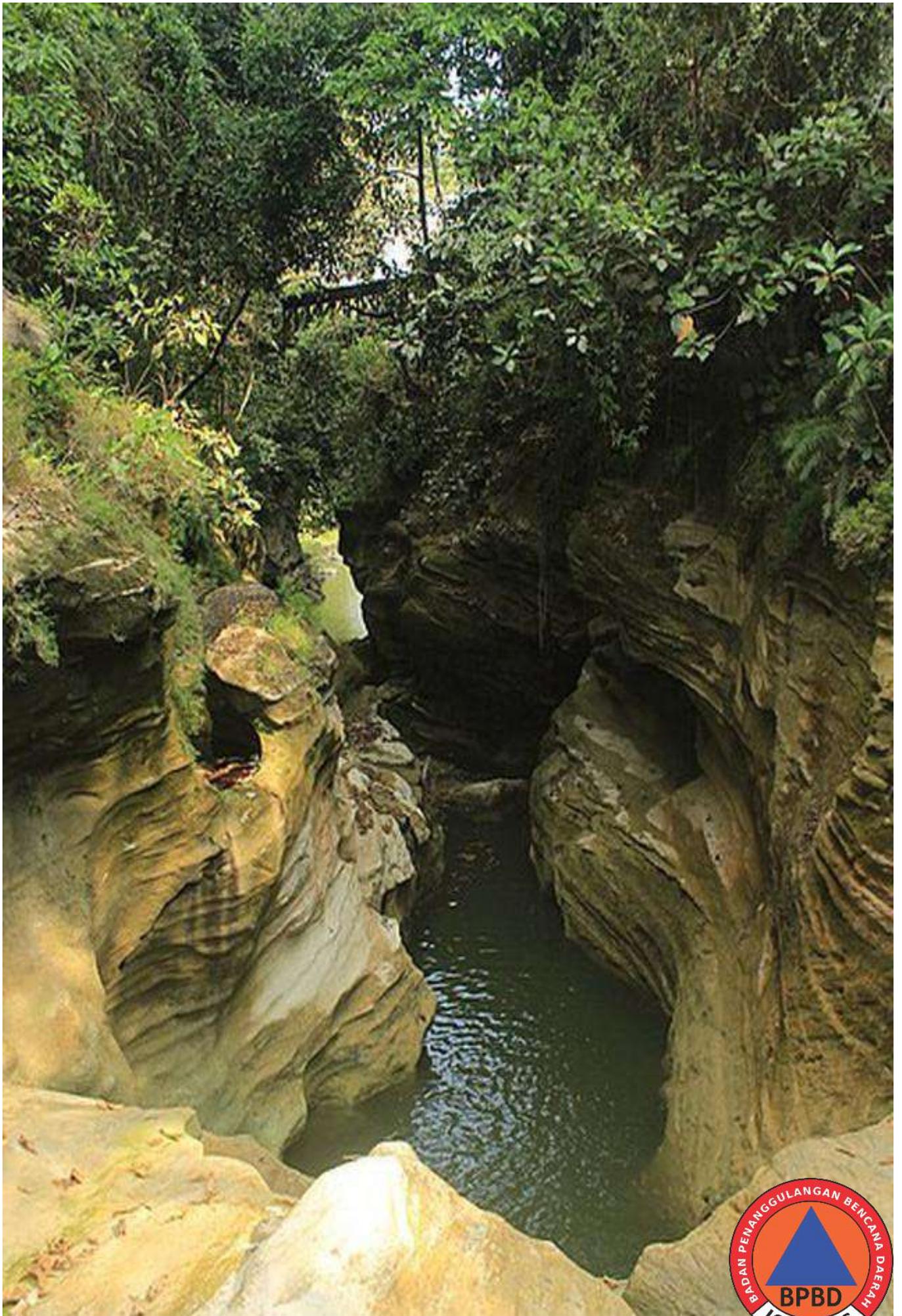
WIKU BIRAWA FILIPE DIAS QUINTAS, S.STP., M.Si.

Pembina

NIP 197801071998031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Struktur Organisasi.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	2
1.3. Isu Strategis.....	3
1.4. Cascading.....	5
1.5. Peta Proses Bisnis	6
1.6. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	6
BAB II IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja	7
2.1.1. Rencana Strategis	7
2.1.2. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	
3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	12
3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir	20
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.....	22
3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja level nasional/ internasional	23
3.1.5. Analisis atas realisasi kinerja	23
3.2. Realisasi Anggaran	
3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran	29
3.2.2. Efisiensi penggunaan sumber daya	30
3.3. Upaya Perbaikan Kinerja.....	33
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	34
4.2. Rekomendasi.....	34
Lampiran-Lampiran	
I. Peta Proses Bisnis	
II. Pendanaan Indikatif pada Renstra	
III. Rencana Kinerja Tahun 2024	
IV. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
V. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	
VI. Bukti Dukung Capaian Kinerja Sasaran	
VII. Bukti Dukung Capaian Kinerja Program	



BAB 1

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Struktur Organisasi

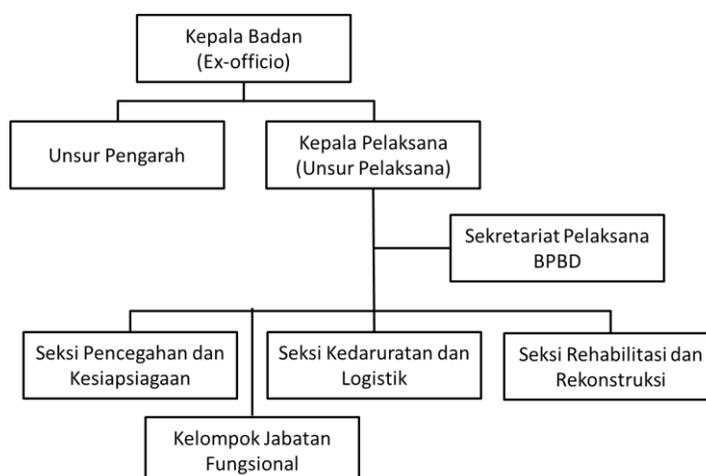
Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Jombang, berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/D) dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 18/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18/D), maka Pemerintah Kabupaten Jombang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, yang selanjutnya merupakan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dengan Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah yaitu :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli;
3. Unsur Pelaksana sebagai berikut :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat,
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik,
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang menurut Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber : Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2011

1.2. Tugas dan Fungsi

Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi .

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
Fungsi Komando sebagaimana dimaksud merupakan fungsi komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Unsur Pelaksana BPBD :

- a. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas :
 - Memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sekretaris Pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
 - Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Pelaksana BPBD;
 - Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan BPBD;
 - Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Pelaksana BPBD;
 - Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Pelaksana BPBD;
 - Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah BPBD;
 - Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BPBD.
- c. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

- Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana;
 - Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

1.3. Isu Strategis

Tugas BPBD Kabupaten Jombang adalah untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kabupaten Jombang yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter *Good Governance*.

BPBD Kabupaten Jombang memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jombang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Jombang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

- a. Belum tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai aksi dari disusunnya Kajian Risiko Bencana Kabupaten Jombang;
- b. Masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana pemantauan dan peralatan penanggulangan bencana pada Pusdalops PB BPBD sehingga dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana khususnya dalam hal pemantauan, pengolahan data dan informasi serta operasi pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana, kebakaran dan musibah lainnya menjadi kurang maksimal;
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sangat menghambat pelayanan operasi pemadaman kebakaran dan masih belum dapat mencapai respon time 15 menit;
- d. Terbatasnya sumberdaya manusia dengan keahlian kebencanaan, sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana menjadi kurang optimal;
- e. Kuantitas dan kualitas personil yang memiliki sertifikat penanggulangan kebakaran kurang memadai.

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kabupaten Jombang, diuraikan dalam tabel pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Banjir Luapan DAS Brantas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sedimentasi sungai yang terus meningkat; 2. Pola hidup masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan; 3. Kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana masih rendah. 	Curah hujan tinggi di musim penghujan pada daerah pegunungan yang mengakibatkan debit air di aliran sub Das Brantas naik dan masuk ke pemukiman
2.	Kebakaran Pemukiman, hutan dan lahan	Tingkat Kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bahaya kebakaran masih rendah.	Masyarakat melakukan pembakaran sampah, konsleting listrik, Titik hot spot musim kemarau
3..	Kekeringan dan Kekurangan Air Bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber air jauh dari masyarakat; 2. Infrastruktur terkait perpipaan air pada daerah kekeringan masih minim; 3. Belum ditemukan sumber air baru pada daerah kekeringan. 	Sumber air habis di saat musim kemarau di beberapa daerah dan resapan air berkurang akibat alih fungsi lahan untuk pemukiman dan industri
4..	Daerah Potensi Longsor tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu pemetaan daerah rawan longsor; 2. Tingkat Kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman lonsor masih rendah. 	Adanya retakan tanah di daerah perbukitan dan alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman atau industri

5..	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	1. Peralatan PB masih belum lengkap; 2. Kondisi Kendaraan Pemadam sudah tua	Pendanaan penyediaan sarpras masih rendah
6..	Sumber Daya Manusia di Bidang kebencanaan	1. Kapasitas SDM di bidang Kebencanaan dan kebakaran perlu ditingkatkan; 2. Terbatasnya personil di bidang kebencanaan dan kebakaran.	Jumlah personil PB dan Pemadam kebakaran semakin berkurang
7.	Fungsi Koordinasi dan Komunikasi dalam penanganan bencana	1. Peraturan daeran tentang Penanggulangan bencana belum ada; 2. Dokumen-dokumen kebencanaan belum lengkap	Kelembagaan BPBD Kabupaten Jombang masih Type B
8.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	Adanya Korban Bencana alam dan Kebakaran yang kehilangan Kebutuhan dasar	Kejadian bencana yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian baik secara materiil dan non materiil.

Sumber : PUSDALOPS BPBD Kabupaten Jombang.

1.4. Cascading

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jombang ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan berdasarkan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Jombang terkait pencapaian Tujuan keempat dari RPD Kabupaten Jombang yaitu Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya.

Indikator Tujuan RPJMD dari Tujuan ketiga ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman. BPBD Kabupaten Jombang mendukung sasaran RPD yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman dengan indikator Indeks Risiko Bencana.

Sasaran OPD merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan RPJMD. Sasaran OPD merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Tujuan BPBD Kabupaten Jombang dapat dibabarkan sebagai berikut:

Tujuan OPD	Indikator Tujuan
1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana.	1. Indeks Risiko Bencana.
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	2. Persentase Capaian Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	3. Nilai AKIP BPBD.
---	---------------------

Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis dari tujuan meliputi:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat.	1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
2. Meningkatnya Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	2. Persentase Korban Kebakaran yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi.
3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja BPBD.	3. Nilai Evaluasi AKIP BPBD.

1.5. Peta Proses Bisnis

BPBD Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis BPBD Kabupaten Jombang dapat digambarkan secara garis besar sebagaimana terlampir.

1.6. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Nomor: X.700/532/415.15/2024, tanggal 16 Agustus 2024, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah 71.31 yang termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik” dengan rincian komponen:

No.	Komponen	LKE	Evaluasi Lapangan	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)
1.	Perencanaan	12,69	15,73	30	23,70	79,00
2.	Pengukuran	22,58	8	30	19,67	65,57
3.	Pelaporan	11,79	5,11	15	10,45	69,67
4.	Evaluasi Kinerja	17,50		25	17,50	70,00
	Total			100	71,31	

Sumber: LHE SAKIP BPBD 2024, Inspektorat.

Catatan atas hasil evaluasi dapat disajikan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja:

Sebagian kecil pegawai telah terlibat dalam perencanaan kinerja, namun belum terdapat pemahaman akan perencanaan yang dilakukan dengan semangat pemecahan masalah riil dan peran individu dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya dan juga dalam melakukan pengukuran kinerja individu belum mempertimbangkan capaian kinerja organisasi serta belum dilakukan pemberian penghargaan dan sanksi.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

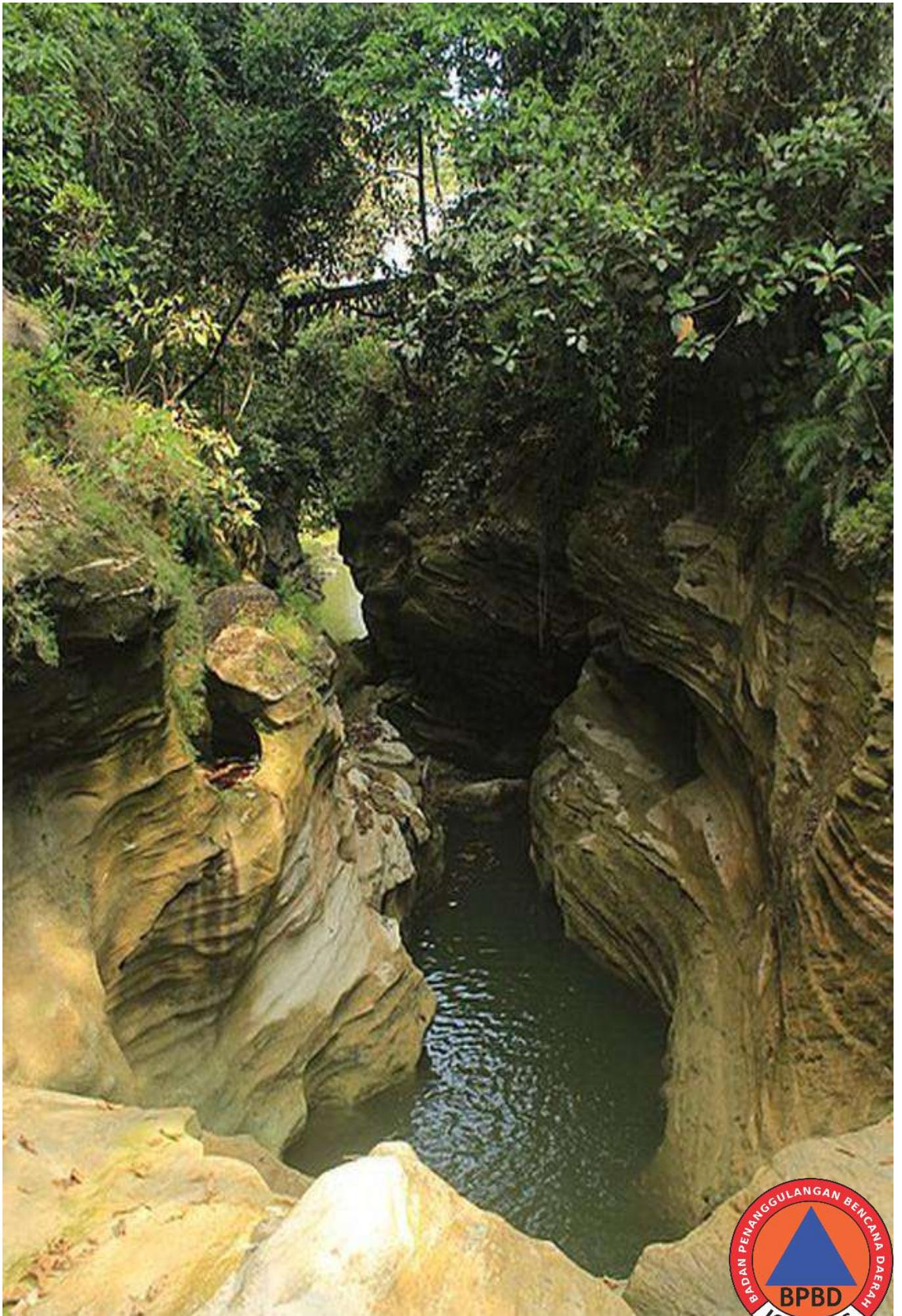
Belum didapatkan adanya upaya yang lebih dalam rangka peningkatan kinerja yang dijelaskan dalam laporan kinerja maupun adanya inovasi dalam mendukung kinerja organisasi.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yaitu belum memperhatikan kualitas dokumen terutama pada komponen perencanaan kinerja sehingga masih terdapat ketidakselarasan antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) dengan Cascading Kinerja.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi yang diterima dan dalam rangka lebih mengefektifkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, beberapa catatan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk implementasi SAKIP selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman pegawai melalui pelibatan “secara aktif” seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional dalam bentuk kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri, Sosialisasi atau bentuk kegiatan lain.
2. Meningkatkan pemahaman pegawai untuk mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya. Agar disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja.
3. Melengkapi laporan agar mempunyai informasi yang lengkap terkait dengan hasil analisis dan upaya tindak lanjut perbaikan dari tahun sebelumnya serta inovasi yang bermanfaat bagi proses bisnis internal dan pengguna layanan/masyarakat.
4. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja secara memadai dan mendalam dengan memperhatikan kualitas dokumen yang dapat diwujudkan dalam penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan cascading.



BAB 11

Ikhtisar Perencanaan Kinerja



BAB II

IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter Good Governance. Dalam perspektif perubahan paradigma dan ditetapkannya penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang bertanggung jawab untuk menjawab tantangan Good Governance di bidang kebencanaan yang uncontrolable dengan kebijakan dan program yang nyata, sehingga resiko bencana yang timbul dapat diminimalisir.

2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

2.1.1. Rencana Strategis

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang terkait dengan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan fungsi utama BPBD kurun waktu 2024-2026 yaitu :

Tema RPD 2024-2026:

Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya Berbasis Agribisnis.

Tujuan 4 RPD 2024-2026

Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggul lainnya.

Indikator Tujuan 4 RPD 2024-2026

Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman

Sasaran 4 RPD 2024-2026

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman.

Indikator Sasaran 4 RPD 2024-2026

Indeks Risiko Bencana.

Dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran RPD yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Perumusan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 ditetapkan yaitu:

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana (berdasarkan indeks resiko bencana kabupaten);
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (berdasarkan Persentase Capaian Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran)
3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi (berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi BPBD)

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dengan mengacu kepada tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2024 adalah :

1. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat;
2. Meningkatnya Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;
3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja BPBD.

Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang menetapkan program - program nya sesuai RPD periode 2024-2026, yaitu;

1. Program utama (teknis); program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam proses sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, dan ;
2. Program penunjang; program ini juga digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua (Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sebagai lembaga penanggulangan bencana.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Jombang dalam mewujudkan sasaran RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penanggulangan Bencana**
 - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
- 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**
 - a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.
- 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.1.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja Tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana Kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2024. Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam lampiran.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang dalam hal ini, perjanjian kinerja dilakukan antara Bupati Jombang dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen dan kesepakatan atas pelaksanaan kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi hanya pada hasil kinerja tahun berkenaan, tetapi termasuk hasil kinerja yang terwujud karena kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Wujud komitmen nyata antara Kepala Daerah dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pelaksanaan melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang telah melakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk mewujudkan target kinerja yang selaras antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja sebagai berikut:

Penetapan Kinerja BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2024 (Sasaran)

Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	0.55
2. Meningkatnya Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Korban Kebakaran yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi	100%
3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP	75,00

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Jombang

**Penetapan Kinerja BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2024
(Program)**

Program	Sasaran Program	Indikator	Target
1. Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya pelayanan dasar penanggulangan bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%
2. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terpenuhinya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	100%
3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Unsur-Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Jombang

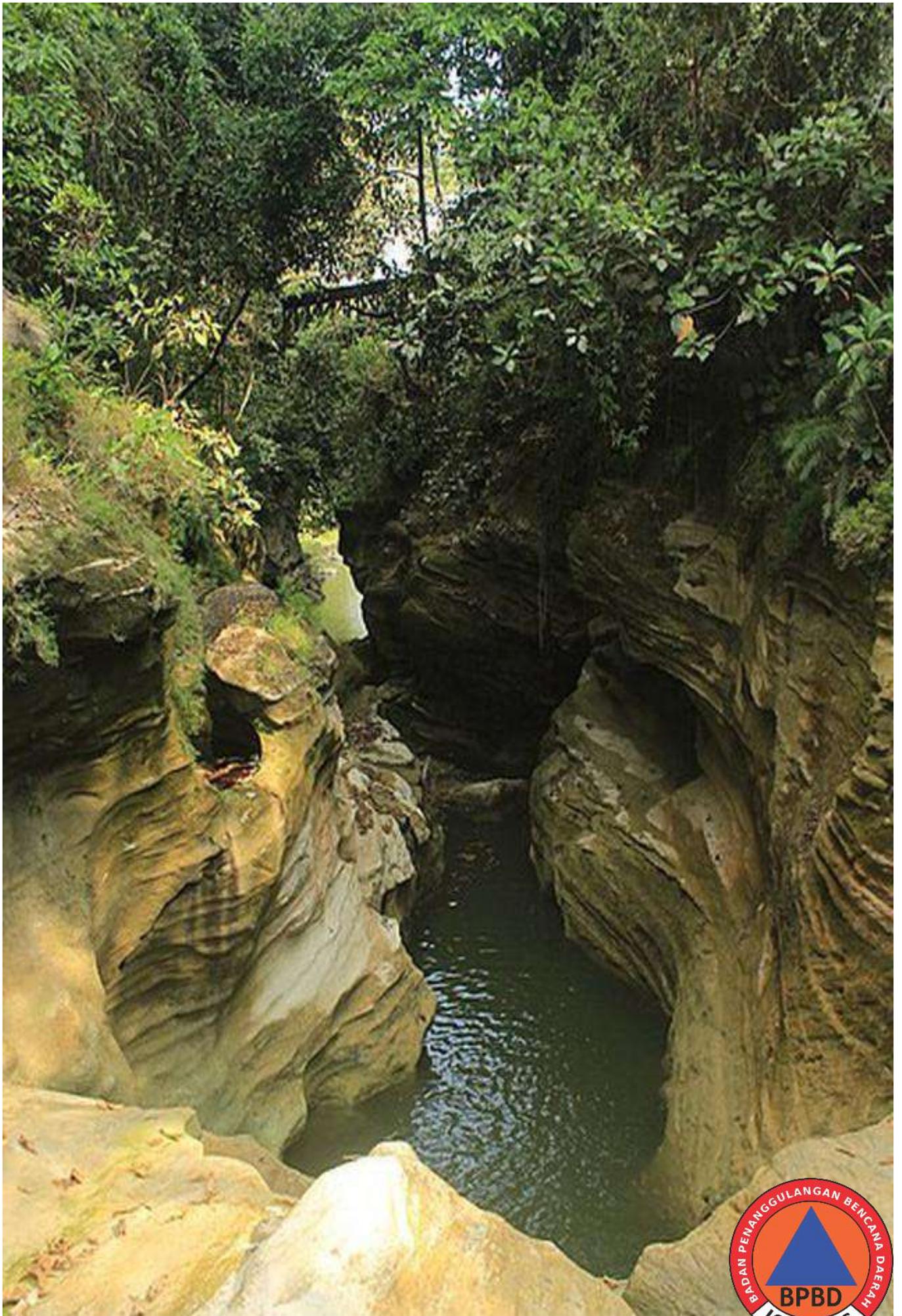
**Penetapan Kinerja BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2024
(Kegiatan)**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah orang didaerah rawan bencana yang meningkat pengetahuan terkait kebencanaan.	625 Orang
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Desa rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan	5 Desa
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terpenuhinya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersusunnya Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersusun	1 Dokumen
5. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasi pemadaman kebakaran, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	100%
6. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran	100%

7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%
8. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%
9. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya laporan administrasi kepegawaian yang tersusun sesuai aturan	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun sesuai aturan	100%
10. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%
11. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%
13. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Jombang

Dalam melaksanakan perjanjian kinerja telah yang telah disepakati, BPBD Kabupaten Jombang melaksanakan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan dukungan APBD Kabupaten Jombang sebesar Rp.7.014.312.302,- (tujuh miliar empat belas juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus dua rupiah).



BAB 999

Akuntabilitas Kinerja



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan laporan yang memberikan gambaran perkembangan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan secara transparan akuntabel.

Pada Tahun Anggaran 2024, BPBD Kabupaten Jombang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai capaian kinerja organisasi dan dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

A. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja Sasaran BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Capaian Kinerja (Sasaran) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian thd Target Tahunan	Capaian tahun 2024
1. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	0.55	0.51	92,73%	92,73%
2. Meningkatnya Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Korban Kebakaran yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Tahun N	BB (75)	BB (71.31)	95,08%	95,08%

Sumber: diolah, BPBD Kabupaten Jombang 2024

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diampu oleh BPBD Kabupaten Jombang mempunyai 3 (tiga) Sasaran yang masing-masing capaian kinerja dianalisis berikut:

1. Indeks Ketahanan Daerah

Capaian Persentase Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya,

dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2024 menghasilkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Jombang sebesar 0,51 dengan tingkat kapasitas daerah Sedang dengan capaian:

**Capaian Indeks Prioritas penilaian Indeks Kapasitas Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2024**

No.	Prioritas	Indeks Prioritas
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,82
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,88
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,83
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,35
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,45
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20

Sumber: diolah, BPBD Kabupaten Jombang 2024

Dari penetapan target Renstra, Indeks Ketahanan Daerah belum dicapai dengan sempurna dengan perolehan Nilai indeks sebesar 0,51 dari target 0,55 sehingga perolehan capaian sebesar 92,73%. Tidak tercapainya target diakibatkan karena perubahan rumus penghitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD). Pada tahun selanjutnya, penghitungan IKD Kabupaten Jombang akan menggunakan rumus penghitungan baru dengan melibatkan multi pihak dan dikonsentrasikan pada pencapaian 7 Fokus Prioritas sebagai berikut:

- a. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;
- b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
- c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik;
- d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
- e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
- f. Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana ;
- g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

sehingga Nilai IKD dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemahaman bahwa bencana adalah urusan bersama.

2. Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi

Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi adalah salah satu hal penting dalam keberhasilan kegiatan penanganan kebakaran dimana pelayanannya dilaksanakan selama 24 jam dalam 7 hari kerja sehingga diharapkan seluruh kejadian Kebakaran, Kondisi Membahayakan Manusia dan Bahan Berbahaya dan Beracun dapat ditangani dengan baik.

Adapun Kejadian Kebakaran, Kondisi Membahayakan Manusia, Bahan Berbahaya dan Beracun dapat disajikan sebagai berikut:

Kejadian Kebakaran, Kondisi Membahayakan Manusia, Bahan Berbahaya dan Beracun

No.	Jenis Kejadian	Jumlah
1	Kebakaran Hutan	0
2	Kebakaran Lahan	67
3	Kebakaran Pemukiman	24
4	Kebakaran Fasilitas Umum	4
5	Kebakaran Tempat Usaha	25
6	Kondisi Membahayakan Manusia	10
7	Penanganan Hewan Buas, Berbisa dan berbahaya	2
8	Kecelakaan Lalu Lintas	12
9	Lain-Lain	13
Jumlah		157

Sumber: Pusedalops PB BPBD Kabupaten Jombang 2024

Dari penetapan target Renstra, pada tahun 2024 seluruh Kejadian Kebakaran, Kondisi Membahayakan Manusia, Bahan Berbahaya dan Beracun dapat ditangani sehingga dapat disimpulkan target dapat dicapai 100%.

3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Jombang diharapkan dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat dengan orientasi kerja pada outcome. Sebagai bagian dari proses implementasi SAKIP, maka pelaksanaan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja yang ada di perjanjian kinerja adalah sebuah tahapan yang harus dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana target-target yang ada dalam indikator kinerja sudah tercapai, mengetahui hambatan atau permasalahan yang dihadapi serta dapat menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2024, Hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang memperoleh nilai **71.31** dengan Kategori **Sangat Baik**, sebagaimana data berikut:

Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024

No.	Komponen	Nilai Evaluasi
1	Perencanaan	23,70
2	Pengukuran	19,67
3	Pelaporan	10,45
4	Evaluasi Kinerja	17,50
Total		71,31

Sumber: Inspektorat Kab Jombang, 2024

Dari penetapan target Renstra, Nilai hasil evaluasi AKIP belum dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan. Capaian Nilai Evaluasi AKIP pada Tahun 2024 yaitu 71,31 dari penetapan target sebesar 75.00 sehingga persentase capaian target dapat dihitung sebesar 95,08%. Hal-hal yang mengakibatkan tidak tercapainya target dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Sebagian kecil pegawai telah terlibat dalam perencanaan kinerja, namun belum terdapat pemahaman akan perencanaan yang dilakukan dengan semangat pemecahan masalah riil dan peran individu dalam mencapai tujuan organisasi;
- b. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya dan juga dalam melakukan pengukuran kinerja individu belum mempertimbangkan capaian kinerja organisasi serta belum dilakukan pemberian penghargaan dan sanksi;
- c. Belum didapatkan adanya upaya yang lebih dalam rangka peningkatan kinerja yang dijelaskan dalam laporan kinerja maupun adanya inovasi dalam mendukung kinerja organisasi;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yaitu belum memperhatikan kualitas dokumen terutama pada komponen perencanaan kinerja sehingga masih terdapat ketidakselarasan antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) dengan Casading Kinerja.

Berdasarkan hasil catatan yang diperoleh, hal-hal yang akan diperbaiki untuk memaksimalkan capaian nilai Evaluasi AKIP direncanakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman pegawai melalui pelibatan “secara aktif” seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional dalam bentuk kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri, Sosialisasi atau bentuk kegiatan lain;
- b. Meningkatkan pemahaman pegawai untuk mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya. Agar disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja;
- c. Melengkapi laporan agar mempunyai informasi yang lengkap terkait dengan hasil analisis dan upaya tindak lanjut perbaikan dari tahun sebelumnya serta inovasi yang bermanfaat bagi proses bisnis internal dan pengguna layanan/masyarakat;
- d. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja secara memadai dan mendalam dengan memperhatikan kualitas dokumen yang dapat diwujudkan dalam penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan cascading.

B. Analisis Capaian Kinerja Program

Capaian kinerja Sasaran BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

**Analisa Capaian Kinerja (Program)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jombang
Tahun 2024**

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian thd Target Tahunan	Capaian tahun 2024
1. Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	100%	100%	100%	100%
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%

Sumber: diolah, BPBD Kabupaten Jombang 2023

Pada Tahun 2024, BPBD Kabupaten Jombang mempunyai 3 (tiga) Program, dengan masing-masing capaian kinerja yang dapat dianalisis berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana

Kinerja Program Penanggulangan Bencana yang tercapai 100% melalui capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang dapat disajikan sebagai berikut:

**Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jombang
Tahun 2024**

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	625 Orang	625 Orang	100%
1.1. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	625 Orang	625 Orang	100%
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5 Desa	5 Desa	100%

2.1. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaannya	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaannya Bencana	5 Kawasan	5 Kawasan	100%
2.2. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	25 Orang	25 Orang	100%
2.3. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dok	1 Dok	100%
2.4. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaannya Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaannya Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kejadian bencana yang tertangani dalam masa tanggap darurat	100%	100%	100%
3.1. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 Orang	150 Orang	100%

Sumber: PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Jombang 2004

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Program Penanggulangan Bencana sebesar 100% dihitung melalui capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercapai 100% sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Capaian kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran adalah sebesar 100% yang dicapai berdasarkan hasil capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang dapat disajikan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pemadaman kebakaran, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditangani dalam waktu tanggap	100%	100%	100%

1.1. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.2. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Lap	12 Lap	100%
1.3. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang	20 Orang	100%
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%
2.1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	150 Orang	150 Orang	100%
2.2. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa	5 Desa	100%

Sumber: Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kabupaten Jombang 2024

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar 100% dihitung melalui capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercapai 100% sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar 100% yang dicapai berdasarkan hasil capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang dapat disajikan sebagai berikut:

**Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jombang
Tahun 2024**

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%
1.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/Bulan	10 Orang/Bulan	100%
2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9 Paket	9 Paket	100%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100%
4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
4.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100%
5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	24 Unit	100%
5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%

5.4. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang direncanakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa pelayanan umum kantor yang direncanakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	46 Unit	100%
7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	100%
7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	46 Unit	100%
7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
7.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	100%

Sumber: Sekretariat BPBD Kabupaten Jombang 2024

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100% dihitung melalui capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercapai 100% sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Pada Tahun 2024 terdapat perubahan Sasaran dan Program serta Indikator Sasaran dan Program dengan deskripsi sebagai berikut:

Sasaran/Program			indikator		
2022	2023	2024	2022	2023	2024
1. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat	Persentase capaian Indikator Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah
1.1. Program Penanggulangan an Bencana	Program Penanggulangan an Bencana	Program Penanggulangan an Bencana	Persentase jumlah jenis layanan penanggulangan bencana yang dipenuhi	Persentase layanan penanggulangan bencana yang dipenuhi	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

					Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Korban Kebakaran yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Korban Kebakaran yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi
2.1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	Persentase Penanganan Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	Persentase Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan
3. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Tahun N	Nilai AKIP
3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur

Sumber: diolah, BPBD Kabupaten Jombang 2024

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2022 – 2024 disajikan pada tabel berikut:

**REALISASI KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2022-2024**

Sasaran/Program	Indikator	2022	2023	2024
1. Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	N/A	0,41	0,51
1.1. Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	N/A	N/A	100%
	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	N/A	N/A	100%
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	N/A	N/A	100%
2. Meningkatkan Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Korban Kebakaran yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi	N/A	N/A	100%
2.1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	N/A	N/A	100%
3. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP	N/A	71,01	73,01
3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	N/A	100%	100%

Sumber: Sekretariat BPBD Kabupaten Jombang 2024

dari Indikator Ketahanan Daerah menjadi Persentase Capaian Indikator Ketahanan Daerah sehingga capaian realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya.

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Capaian Realisasi Kinerja dalam Periode Renstra

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian					Target Akhir Renstra	Kemajuan
		2022	2023	2024				
				Target	Realisasi	Hasil		
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	-	-	0,55	0,51	92,73%	0,75	73.33%
Meningkatnya Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Korban Kebakaran yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP	-	-	BB (75)	BB (71,31)	95,08%	A (80)	89.14%

Sumber: IRBI BNPB, 2024, IRB Prov Jatim, 2024, Inspektorat Kab Jombang, 2024

Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat yang dihitung melalui Indeks Ketahanan Daerah yang merupakan salah satu komponen penyusun yang paling cepat dicapai dari penghitungan Indeks Risiko Bencana, Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah. Penilaian secara berkala dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu yang berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Timur melalui IRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Jombang sebesar 0,51 pada Tahun 2024 sehingga kemajuan dalam mencapai target akhir renstra sebesar 73,33%.

Upaya pencapaian sasaran Meningkatkan Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan dalam bentuk Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi berupa pelaksanaan kegiatan penanganan kebakaran yang dilaksanakan selama 24 jam dalam 7 hari kerja telah berhasil dicapai dengan sempurna dengan tertanganinya seluruh kejadian Kebakaran, Kondisi Membahayakan Manusia dan Bahan Berbahaya dan Beracun dengan baik. Capaian Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi sebesar 100% pada Tahun 2024 sehingga kemajuan dalam mencapai target akhir renstra sebesar 100%.

Capaian hasil evaluasi SAKIP masih terhambat permasalahan-permasalahan yang timbul, akan tetapi munculnya permasalahan diharapkan dapat diselesaikan dengan melakukan tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi perbaikan dan masih mengalami peningkatan dalam periode Renstra. Capaian Nilai Evaluasi SAKIP pada Tahun 2024 sebesar 71.31 dapat diartikan bahwa Capaian Nilai Evaluasi SAKIP pada BPBD Kabupaten Jombang mencapai 95,08% pada Tahun 2024 atau 89.14% pada akhir periode renstra Tahun 2026.

Penghitungan Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2022 dan 2023 tidak bisa dijadikan komponen dasar dalam penghitungan persentase kemajuan capaian realisasi kinerja, hal ini karena Periode Renstra adalah Tahun 2024-2026.

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja level nasional/ internasional

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Provinsi dan Nasional

Sasaran	Indikator	Realisasi Kab. Jombang Tahun 2024	Realisasi Prov. Jatin Tahun 2024	Realisasi Nasional	Ket.
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	0,51	0,68	-	(+)
Meningkatnya Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Korban Kebakaran yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi	100%	100%	100%	(+)

Sumber: BNPB, 2024, BPBD Prov. Jatim, 2024, Satpol PP Prov. Jatim, 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2024, capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang berkontribusi positif pada capaian Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur. Meningkatnya ketangguhan/ketahanan Kabupaten Jombang menjadi faktor penambah dan pendorong Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Indeks Ketahanan Nasional. Penanganan seluruh kejadian kebakaran yang dilaksanakan di Kabupaten Jombang juga menjadi faktor untuk mempertahankan pelayanan pencegahan bahaya kebakaran di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

3.1.5. Analisis atas realisasi kinerja

Pencapaian target kinerja pada BPBD Kabupaten Jombang, tidak terlepas dari terlaksananya program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat dianalisis yaitu:

A. Program Penanggulangan Bencana:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana:

- a. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
- d. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana:

- a. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- a. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

- B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran:**
- 1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota:**
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.
 - 2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**
 - a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat;
 - b. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.
- C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:**
- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:**
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
 - 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud;
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dijabarkan sebelumnya tidak terdapat permasalahan yang berarti. Hal ini dibuktikan bahwa seluruh target kinerja Program dan Kegiatan dapat tercapai 100%.

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang tetap menghadapi hambatan-hambatan yang dapat disajikan sebagai berikut:

1. Masih minimnya kebijakan daerah tentang Penanggulangan Bencana;
2. Struktur organisasi BPBD yang masih Type B;
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik masih dikonsentrasikan pada internal BPBD;
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana masih berfokus pada Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana masih belum dilaksanakan;
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana masih berkonsentrasi pada penanganan darurat bencana;
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana hanya pada penggantian bahan material;
8. Pemadam Kebakaran dan Penyelamat belum berdiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah tersendiri yang mengakibatkan tidak seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan;
9. Indikator Kinerja Sasaran "Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat" belum memenuhi kriteria SMART pada aspek Spesifik karena belum menggambarkan parameter kinerja secara khusus.

3.2. Realisasi Anggaran

Capaian realisasi keuangan atas pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada BPBD Kabupaten Jombang secara keseluruhan tercapai sebesar 92,69% yang dialokasikan untuk 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.7.014.312.302,- (tujuh miliar empat belas juta tiga ratus dua rupiah) dan capaian realisasi keuangan sampai dengan Rp.6.621.298.211,- (enam miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sebelas rupiah).

Realisasi keuangan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Realisasi Keuangan Tiap Sub Kegiatan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
I	Program Penanggulangan Bencana	819.844.019	814.160.464	99,31%
I.1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	29.735.000	29.234.400	98,32%
I.1.1	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	29.735.000	29.234.400	98,32%
I.2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	231.646.000	230.781.784	99,63%
I.2.1	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	32.300.000	31.655.000	98,00%
I.2.2	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	278.925.000	277.749.250	99,58%
I.2.3	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	105.290.000	104.517.500	99,27%
I.2.4	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	20.138.019	18.969.500	94,20 %
I.3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	231.646.000	230.781.784	99,63%
I.3.1	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	152.000.000	151.969.316	100,00%
I.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	79.646.000	78.812.468	98,95%
I.4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	121.810.000	121.253.030	99,54%
I.4.1	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	104.900.000	104.512.500	99,63%
I.4.2	Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	16.910.000	16.740.530	99,00%
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	380.022.850	365.044.332	96,06%
II.1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.431.897.200	1.317.646.073	92,02%
II.1.1	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.610.000	55.450.000	99,71%

II.1.2	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	208.949.800	202.006.332	96,68%
II.1.3	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	75.870.000	68.400.000	90,15%
II.2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	39.593.050	39.188.000	98,98%
II.2.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	18.093.050	17.938.000	99,14%
II.2.2	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	21.500.000	21.250.000	98,84%
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.760.607.285	2.535.620.922	91,85%
III.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.140.000	5.752.000	93,68%
III.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.132.500	3.092.500	98,72 %
III.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	870.000	830.000	95,40%
III.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.665.000	3.585.000	97,82%
III.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.835.707.533	1.597.369.369	87,02%
III.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.752.147.533	1.515.809.369	86,51%
III.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82.950.000	80.970.000	97,61%
III.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	610.000	590.000	96,72%
III.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.400.000	5.310.000	98,33%
III.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.400.000	5.310.000	98,33%
III.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.905.500	549.760.171	93,67%%
III.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.363.000	13.350.170	99,90%
III.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.806.800	34.722.100	99,76%
III.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.425.000	5.968.500	80,38%
III.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.530.200	316.128.755	90,19%
III.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.202.000	13.511.752	95,14%

III.4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	1.890.000	85,14%
III.4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.358.500	164.188.894	99,90%
II.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	754.953.850	747.931.500	99,07%
III.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	9.970.000	9.600.000	96,29%
III.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	271.979.350	269.925.000	99,24%
III.5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	47.947.500	47.687.500	99,46%
III.5.4	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	425.057.000	420.719.000	98,98%
III.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.737.784.800	1.652.681.394	95,10%
III.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.680.000	115.842.291	90,02%
III.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.609.104.800	1.536.839.103	95,51%
III.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	886.026.250	881.533.481	99,76%
III.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	886.026.250	881.533.481	99,49%
III.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	452.710.000	452.617.631	99,98%
III.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.378.250	43.321.000	99,87%
III.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	113.178.000	112.306.000	99,23%
III.7.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.210.000	25.497.350	93,71%
Jumlah		7.014.312.302	6.621.298.211	94,40%

Sumber: diolah, BPBD Kab. Jombang 2024

Dari tabel tersebut diatas, persentase realisasi keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Persentase Realisasi Keuangan Tahun 2024

No	Persentase Realisasi keuangan	Jumlah	Ket.
1	95,01 – 100%	31	Sub Kegiatan
2	90,01 – 95,00%	5	Sub Kegiatan
3	00,00 – 90,00 %	3	Sub Kegiatan
Jumlah		39	Sub Kegiatan
			100%

Sumber: diolah, BPBD Kab. Jombang 2024

Capaian realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

1. Pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan riil;
2. Efisiensi anggaran dari masing-masing kegiatan.

3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

Dalam memberikan layanan penanggulangan bencana dan kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang bertanggung jawab mencapai target kinerja dan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023. Capaian realisasi kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023

Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	151.545.000	150.487.430	99,30%
	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%	436.653.019	432.891.250	99,14%
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	231.646.000	230.781.784	99,63%
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	100%	100%	100%	380.022.850	365.044.332	96,06%
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	5.814.445.433	5.442.093.415	93,60%
Total		100%	100%	100%	7.014.312.302	6.621.298.211	94,40%

Sumber: diolah, BPBD Kabupaten Jombang 2024

Sebagaimana tabel di atas, dapat dijabarkan bahwa pada Tahun 2024 capaian kinerja program dapat dicapai 100% yang diartikan bahwa seluruh pelayanan penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran serta pemenuhan kebutuhan pegawai dan administratif rutin dapat dipenuhi sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 94,40% sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja dapat dicapai dengan meminimalkan penggunaan anggaran berbasis pengeluaran riil.

3.2.2. Efisiensi penggunaan sumber daya

A. Efisiensi Penggunaan SDM

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang didukung oleh sumber daya manusia untuk mencapai sasaran kinerja tahunan dapat disajikan sebagai berikut:

No	Jenis Jabatan	Keter sediaan	Kebu tuhan	Selisih
1	Kepala Pelaksana	1	1	0
2	Analisis Kebakaran Ahli Madya	0	3	-3
3	Perencana Ahli Muda	0	1	-1
4	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	0	6	-6
5	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	0	3	-3
6	Analisis Kebakaran Ahli Muda	0	3	-3
7	Sekretaris	1	1	0
8	Perencana Ahli Pertama	0	1	-1
9	Bendahara	0	1	-1
10	Pengelola Keuangan	1	1	0
11	Pengelola Barang Milik Negara	0	1	-1
12	Pengelola Kendaraan	0	1	-1
13	Pengelola Gudang	0	1	-1
14	Pengelola kepegawaian	0	1	-1
15	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	0	1	-1
16	Pengadministrasi Persuratan	0	1	-1
17	Pramu Kebersihan	0	1	-1
18	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	1	0
19	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	0	4	-4
20	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	0	1	-1
21	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	0	5	-5
22	Pemadam Kebakaran Penyelia	0	4	-4
23	Pemadam Kebakaran Mahir	0	30	-30
24	Pemadam Kebakaran Terampil	0	51	-51
25	Pemadam Kebakaran Pemula	10	60	-50
26	Pranata Bencana	0	4	-4
27	Pranata Pemadam Kebakaran	3	3	0
28	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	1	1	0
29	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	0	4	-4
30	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	0	1	-1
31	Pranata Bencana	0	35	-35
32	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	1	0
33	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	0	2	-2
34	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	0	1	-1
35	Pranata Bencana	0	4	-4
Jumlah		19	240	-221

Sumber: Sekretariat BPBD Kabupaten Jombang 2023

Capaian kinerja Tahun 2024 yang tercapai 100% sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan dapat diraih walaupun ketersediaan ASN di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang hanya sejumlah 19 (sembilan belas) orang, akan tetapi didukung oleh Pegawai Non ASN sejumlah 75 (tujuh puluh lima) orang sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai target kinerja dapat dilakukan dengan tidak mengurangi capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang.

B. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah dimiliki yang dapat disajikan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Keter sediaan	Kebu tuhan	Selisih
1	excavator lainnya (dst)	1	1	0
2	alat pengangkat lainnya (dst)	1	1	0
3	Water Treatment (Mesin Proses)	1	1	0
4	Transportable Generating Set	2	2	0
5	Portable Generating Set	6	6	0
6	Transportable Water Pump	1	1	0
7	Pompa Air	1	1	0
8	pompa lainnya (dst)	10	10	0
9	Breathing Aparatus (Tabung 10 kg)	11	11	0
10	Jeep	1	1	0
11	Station Wagon	4	4	0
12	Truck + Attachment	1	1	0
13	Pick Up	1	1	0
14	Sepeda Motor	23	23	0
15	Mobil Ambulance	4	4	0
16	Mobil Pemadam Kebakaran	6	6	0
17	Mobil Tangki Air	2	2	0
18	Kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	4	4	0
19	Speed Boat / Motor Tempel	1	1	0
20	Perahu Penumpang	1	1	0
21	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1	1	0
22	Mesin Gerinda	1	1	0
23	Mesin Gergaji	2	2	0
24	Gergaji Chain Saw	6	6	0
25	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	1	0
26	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2	2	0
27	Lemari Besi/Metal	1	1	0
28	Lemari Kayu	5	5	0
29	Rak Besi	5	5	0
30	Rak Kayu	3	3	0
31	Filing Cabinet Besi	5	5	0
32	Brandkas	1	1	0
33	Alat Penghancur Kertas	1	1	0
34	Mesin Absensi	1	1	0
35	Papan Nama Instansi	1	1	0
36	Kursi Kayu	1	1	0
37	Sice	1	1	0
38	Meja Rapat	1	1	0
39	Meja Tambahan	2	2	0
40	Meja 1/2 Biro	36	36	0
41	Kursi Biasa	11	11	0
42	Kursi Lipat	5	5	0
43	Sofa	1	1	0
44	Meubeleur lainnya	25	25	0
45	Mesin Pemotong Rumput	1	1	0
46	Lemari Es	1	1	0
47	A.C. Split	7	7	0
48	Kipas Angin	4	4	0
49	Exhaust Fan	2	2	0
50	Televisi	5	5	0

51	Wireless	1	1	0
52	Tangga Aluminium	1	1	0
53	Alat Pemadam/Portable	4	4	0
54	Hidran Kebakaran	1	1	0
55	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0
56	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	0
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	0
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	2	2	0
60	Kursi Tamu di Ruangn Pejabat Eselon III	1	1	0
61	Buffet Kaca	1	1	0
62	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	1	0
63	Camera Electronic	3	3	0
64	Layar Film/Projector	2	2	0
65	Camera Conference	1	1	0
66	Alat Studio Video Lainnya	9	9	0
67	Alat Studio Lainnya	7	7	0
68	Handy Talky (HT)	41	41	0
69	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	1	0
70	Unit Tranceiver VHF Portable	1	1	0
71	Unit Tranceiver UHF Portable	1	1	0
72	Satellite Link (Up/Down Link)	1	1	0
73	switcher/menara antena lainnya (dst)	1	1	0
74	Alat Kedokteran umum lainnya	2	2	0
75	Meja Kerja	2	2	0
76	Alat Khusus Keamanan Lainnya	4	4	0
77	alat keamanan lainnya (dst)	1	1	0
78	Tameng	3	3	0
79	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	1	0
80	P.C Unit	4	4	0
81	Lap Top	6	6	0
82	Note Book	2	2	0
83	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1	0
84	Monitor	1	1	0
85	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	14	0
86	Peralatan Komputer lainnya	1	1	0
87	Tenda	17	17	0
88	alat sar lainnya lainnya (dst)	2	2	0
89	Monitor Display Ruang Pertemuan	0	4	4
90	Kamera Zoom Ruang Pertemuan	0	1	1
91	Monitor Pusdalops	0	8	8
92	Meja Kayu Workstation Pusdalops	0	1	1
93	Komputer Pusdalops	0	1	1
94	Kursi Staf n Pusdalops	0	10	10
95	HP Pusdalops	0	1	1
96	Kompresor ban	0	1	1
97	Kursi pimpinan ruang pertemuan	0	3	3
98	Kursi peserta ruang pertemuan	0	50	50
99	Mesin Finger Print	0	1	1
100	Mesin Standpet	0	1	1
101	Mesin Penghancur kertas	0	1	1
102	Printer Multi A3	0	1	1
103	Almari arsip Dorong	0	2	2
104	Underwater Searching Device	0	1	1
105	Aqua eye	0	1	1
106	Laptop Bendahara	0	1	1
107	Sound lapangan	0	1	1
108	Manekin RJP	0	1	1
109	Alat klem selang damkar	0	1	1

110	Selang Pemadam Kebakaran 1,5"	0	20	20
111	Printer Epson L121	0	2	2
112	AC Split 2 pk	0	2	2
Jumlah		372	488	116

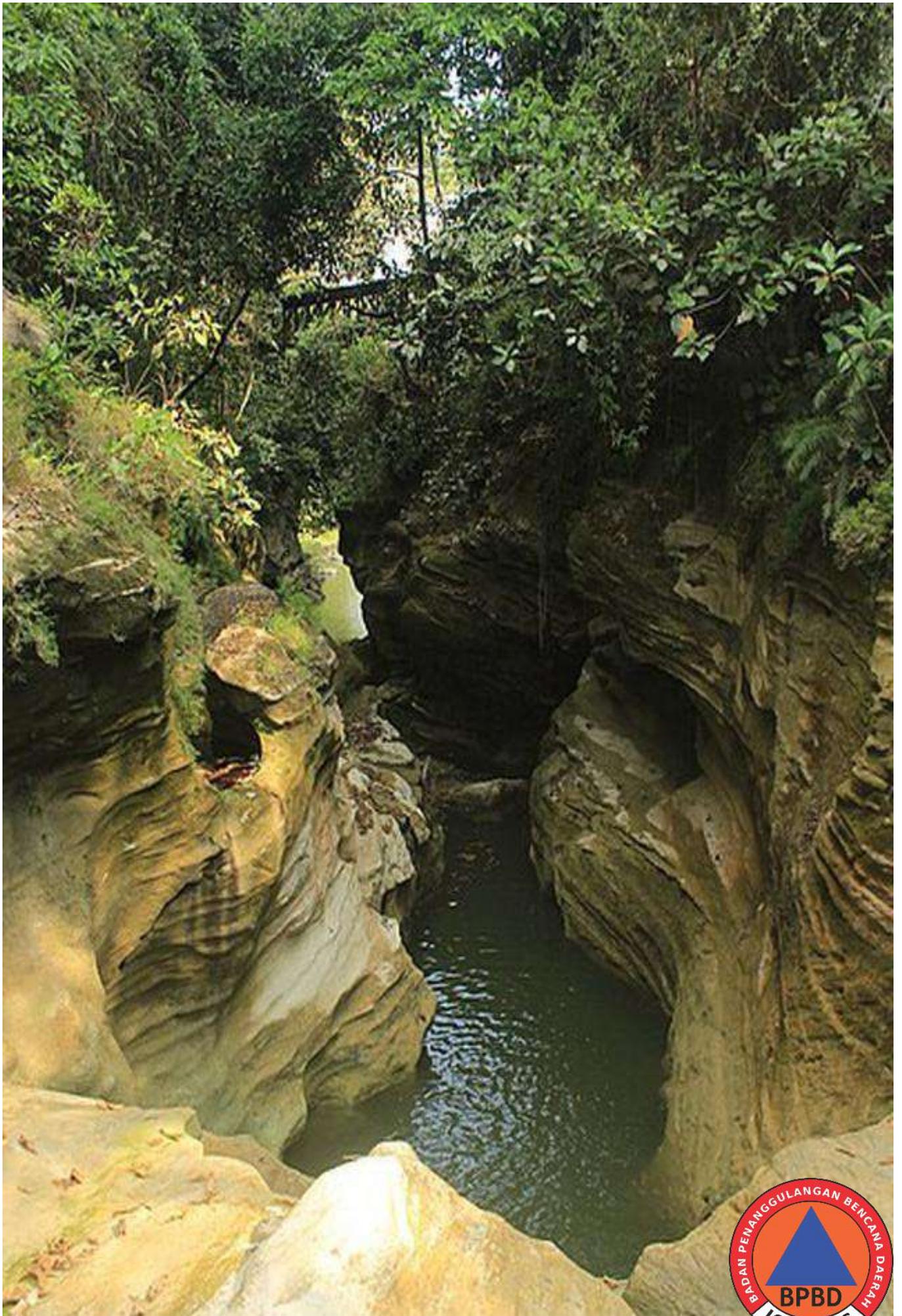
Sumber: Sekretariat BPBD Kabupaten Jombang 2023

Capaian kinerja Tahun 2024 yang tercapai 100% sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan dapat diraih dengan memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana dalam mencapai target kinerja dapat dilakukan dengan tidak mengurangi capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang.

3.3. Upaya Perbaikan kinerja

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat, diperlukan solusi-solusi alternatif sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Diperlukan keikutsertaan unsur legislatif dalam penyusunan perundang-undangan dengan berbasis pada pengurangan resiko bencana;
2. Pelibatan unsur akademisi dalam hal penyusunan kajian teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana akan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dokumen kajian, perencanaan kebencanaan;
3. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan dan Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari unsur pentahelix;
4. Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana dalam hal Penerapan sumur resapan dan/atau biopori, Perlindungan daerah tangkapan air, Restorasi sungai, Penguatan lereng, Optimalisasi pemanfaatan air permukaan, Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi, Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota dan Konservasi vegetatif DAS rawan longsor;
5. Penguataan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam bentuk penyusunan Rencana Kontinjensi dan pengaktifasian Sistem Peringatan Dini untuk masing-masing ancaman;
6. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dalam bentuk Pemulihan pelayanan dasar pemerintah dan Pemulihan Penghidupan masyarakat
7. Mengusulkan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kabupaten Jombang agar pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan sebagai salah satu Urusan Wajib Pelayanan dasar dapat dilaksanakan dengan maksimal.



BAB IV
Penutup



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, telah berupaya mengelola sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada BPBD. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang yang meliputi capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan.

Dari uraian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, secara ringkas disampaikan bahwa diawali dari memilah isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran yang sesuai dengan isu strategis yang dilanjutkan dengan menetapkan target kinerja dan melakukan analisis terhadap kinerja tersebut melalui pengukuran capaian kinerja maupun akuntabilitas keuangan. Setelah dilaksanakan analisis bahwa seluruh target/sasaran yang ditetapkan telah tercapai maka dapat disimpulkan bahwa kinerja sesuai tupoksi maupun tugas tambahan yang dipercayakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang telah dilaksanakan dengan baik.

4.2. Rekomendasi

Menyikapi tantangan yang dihadapi selama ini, maka beberapa strategi perlu dirumuskan kembali untuk pencapaian dan peningkatan kualitas Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jombang, antara lain:

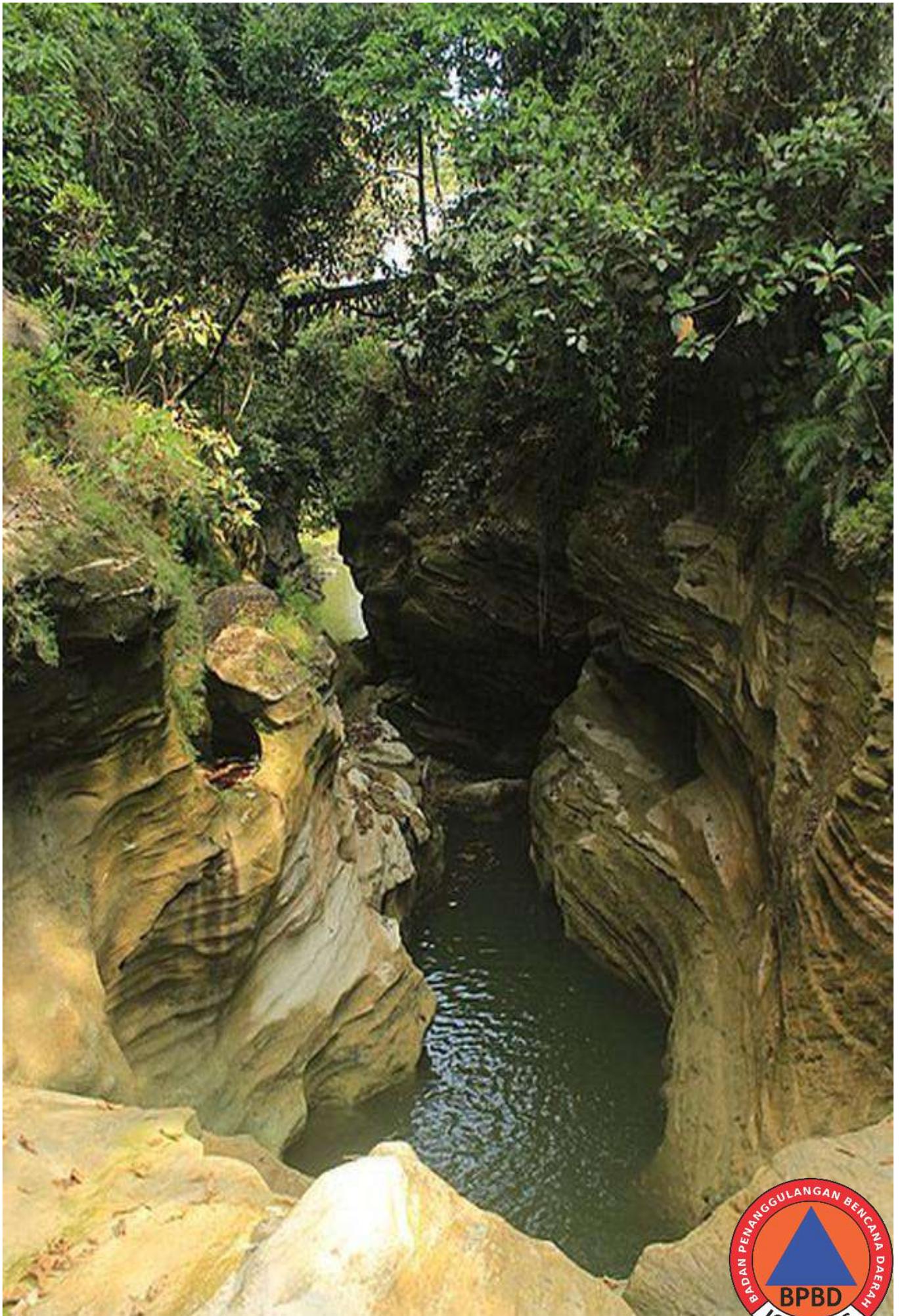
1. Meningkatkan jumlah dan jenis dokumen perencanaan kebencanaan;
2. Meningkatkan kemampuan teknis penanggulangan bencana melalui pendidikan dan latihan;
3. Melakukan perluasan jangkauan edukasi pengurangan risiko bencana dan kebakaran;
4. Memaksimalkan Pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana;
5. Memberikan pelatihan secara tepat kepada unsur Pentahelix Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dalam semua fasenya;
6. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan bidang kebencanaan dan kebakaran baik yang bersifat operasional maupun teknis administratif kepada aparatur pemerintah, sehingga kegiatan menjadi lebih akuntabel dan transparan;
7. Mendorong restrukturisasi kelembagaan BPBD Kabupaten Jombang untuk lebih memaksimalkan pelayanan pada masyarakat;

8. Meningkatkan dan mendorong kerjasama antara pemangku kepentingan penanggulangan bencana dan kebakaran terutama pada peran masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media;
9. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada DPRD Kabupaten Jombang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jombang untuk pengalokasian anggaran yang tepat pada upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di Kabupaten Jombang;
10. Melakukan kerjasama dengan lembaga donor nasional maupun internasional untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat, Program Corporate Social Responsibility (CSR) di berbagai lembaga usaha juga dapat dikelola sebagai bagian dukungan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan pelayanan yang akan datang.

SALAM TANGGUH DAN SALAM KEMANUSIAAN.

INTINE TETEP SEMANGAT TANPO SAMBAT.



Lampiran 1

Peta Proses Bisnis

